#BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

dpmptsp PURWAKARTA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

RENJA

RENCANA KERJA

DPMPTSP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN 2027

"Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Investasi yang Berkualitas untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan"

MENDORONG INVESTASI BERKUALITAS

PELAYANAN PERIZINAN YANG CEPAT & MUDAH

PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING

TATA KELOLA YANG BAIK DAN TRANSPARAN

dpmptsp.purwakartakab.go.id | dpmptsp.purwakarta | Purwakarta Istimewa

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Sampurasun,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 telah selesai disusun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan, Rencana Kerja ini merupakan rencana kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada Masyarakat.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Purwakarta, 28 Juli 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DPMPTSP

Ryan Oktavia, S.T, M.M., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197310171999011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GRAFIK iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.3.1 Maksud 4
1.3.2 Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kab. Purwakarta Tahun 2025 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kab. Purwakarta. 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Purwakarta 32
Tabel 2.4 Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2025 32
2.4. Reviu Terhadap RKPD 59
2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 74
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 75
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 75
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta 78
3.3 Program dan Kegiatan 80
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA 82
BAB V PENUTUP 123

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 HASIL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 8
TABEL 2. 2 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA 11
TABEL 2. 3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA..... 31

TABEL 4.1 RENCANA KERJA TAHUN 2027 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA 83

DAFTAR GRAFIK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun dengan mempedomani Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah diawali dengan penyusunan Renja. Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 dimulai dengan penyusunan Renja pada minggu pertama bulan Desember tahun 2025. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai paling lambat minggu pertama bulan Desember. Selanjutnya, untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan prakiraan maju dalam Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 dengan Renstra DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029, maka penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 dilaksanakan dengan mempedomani Renstra DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029, hal ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta perkiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Sementara itu, dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah juga perlu berpedoman kepada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dengan tujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka

optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan PemerintahDaerah Kabupaten/Kota;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
12) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
21) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

22) Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 43);

23) Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 30 Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2027.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 yaitu untuk merumuskan program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur kinerja, sesuai dengan tugas, fungsi dan rincian tugas unit dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2027.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 ini adalah untuk:

1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
2) Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah
3) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
4) Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan

pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

5) Menjadi acuan dalam penyusunan laporan capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah, dan penyusunan laporan lainnya
6) Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun anggaran;

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kab. Purwakarta Tahun 2025 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM,

maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kab. Purwakarta.
2.4 Reviu Terhadap RKPD.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kab. Purwakarta
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kab. Purwakarta Tahun 2025 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kab. Purwakarta.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat sasaran yang ingin dicapai dan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Evaluasi adalah suatu upaya untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan, yang nantinya hasil evaluasi digunakan oleh pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan untuk perencanaan ke depan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan, apakah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan telah mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahun berikutnya. Rencana kerja (Renja) menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2025 dengan perkiraan capaian pelaksanaan tahun berjalan yakni tahun 2026. Dinamika perkembangan regulasi, khususnya terkait perencanaan dan penganggaran dalam beberapa tahun terakhir, mempengaruhi kinerja dan perkiraan target capaian dalam penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2027.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025 di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta berpedoman kepada sasaran, indikator kinerja utama (IKU), program dan kegiatan yang tercantum pada dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal telah menetapkan tujuan perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2025-2029 yaitu **Mewujudkan Iklim Penanaman Modal Daerah Yang Kondusif, Kompetitif, Inklusif, Dan Berkelanjutan**. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta didukung oleh 2 (dua) Sasaran dan 3 (tiga) Indikator utama yaitu:

Tabel 2.1 Hasil Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Indikator Kinerja Utama (IKU)							
1.	Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Peningkatan Daya Saing Wilayah	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Rp. 8,46 (Triliun)	Rp. 12,47 (Triliun)	147,43	Melampaui	Data Realisasi Investasi DPMPTSP Provinsi Jawa Barat
2.	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Serta Pelayanan Penanaman Modal Yang Prima	Capaian SAKIP	91,20	76,9	84,32	Tinggi	LHE Tahun 2025
		Indeks Kepuasan Masyarakat	93,10	96,66	103,82	Melampaui	Survey Kepuasan Masyarakat

Sumber : LKjIP DPMPTSP, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pengukuran Kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

1. Sasaran I "Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Peningkatan Daya Saing Wilayah" dengan indikator Nilai Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2025 mendapatkan kategori melampaui dengan nilai realisasi investasi Rp. 12.472.353.346.123,- sehingga capaian kinerjanya mencapai 147,43% dengan target Rp. 8.460.000.000.000.-

2. Sasaran II "Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Serta Pelayanan Penanaman Modal Yang Prima" dengan indikator Capaian SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Capaian SAKIP Tahun 2025 mendapatkan predikat tinggi dengan nilai 76,9, sedangkan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2025 mendapatkan predikat sangat baik dengan nilai 96,66 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian terhadap target kinerja sasaran sebagaimana telah disebutkan bukan berarti tanpa hambatan, adapun permasalahan dalam penanaman modal dan perijinan yang masih terjadi dan menjadi kendala dalam peningkatan kinerja DPMPTSP tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a) Data potensi investasi yang tersedia kurang memadai.
b) Implementasi insentif dan fasilitasi penanaman modal belum terwujud.
c) Pemanfaatan saluran promosi berupa event dan platform digital belum maksimal.
d) Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan penanaman modalnya di Kabupaten Purwakarta.
e) Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam bidang teknologi informasi dan teknis perizinan.
f) Masih banyak Perizinan Berusaha dari pelaku usaha belum terverifikasi.
g) Masih rendahnya digitalisasi dalam perizinan dan kesulitan implementasi *system online* pada Perizinan dan Non Perizinan diluar *OSS RBA.*

Permasalahan tersebut menjadi masukan serta acuan dalam penyusunan rencana kerja di Tahun 2027 ini sehingga dapat terakomodir dalam program dan kegiatan prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2027. Sedangkan berdasarkan tingkat

pencapaian Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta terhadap target pada Renstra 2025-2029 atas realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

Kode					No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	18	01			**I**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah** **Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang berfungsi optimal**	**75,00** **94,65**	**NA**	**70,00** **91,46**	**70,00** **91,46**	**100%** **100%**	**71,00** **92,46**	**71,00** **92,46**	**18%**
2	18	01	2.01		**1**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	1 Dokumen	33%
2	18	01	2.01	0001	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
2	18	01	2.01	0006	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan			1.00 Laporan	1.00 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode					No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
2	18	01	2.01	0007	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.00 Laporan	5.00 Laporan	100%	4 Laporan	1 Laporan	25%
2	18	01	2.02		**2**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	1 Dokumen	33%
2	18	01	2.02	0001	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			46 orang	46 orang	82%	46 orang	46 orang	100%
2	18	01	2.02	0005	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

Kode					No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	18	01	2.02	0007	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	1 Laporan	33%
2	18	01	2.03		**3**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
2	18	01	2.03	0005	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	33%

Kode					No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	18	01	2.05		**4**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
2	18	01	2.05	0002	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			4 Paket	4 Paket	100%			0%
2	18	01	2.05	0009	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			85.00 Orang	72 Orang	85%			0%
2	18	01	2.06		**5**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%	7 Kegiatan	0 Kegiatan	0%
2	18	01	2.06	0001	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan			1.00 Paket	1.00 Paket	100%	1.00 Paket		0%

Kode					No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Bangunan Kantor	Kantor yang Disediakan								
2	18	01	2.06	0003	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket		0%
2	18	01	2.06	0004	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			10.00 Paket	9 Paket	90%	9 Paket		0%
2	18	01	2.06	0005	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			20.00 Paket	20 Paket	100%	20 Paket		0%
2	18	01	2.06	0006	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen		0%
2	18	01	2.06	0009	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan			200.00 Laporan	189 Laporan	94,50%	189 Laporan		0%

Kode					No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Konsultasi SKPD								
2	18	01	2.06	0010	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang tertata			1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100%	1.00 Dokumen		0%
2	18	01	2.07		**6**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0%
2	18	01	2.07	0005	-	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			10.00 Unit	10.00 Unit	100%	10.00 Unit		0%
2	18	01	2.07	0006	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			30 Unit	30 Unit	100%	30 Unit		0%
2	18	01	2.08		**7**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional Dinas Yang Dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0%

Kode					No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	18	01	2.08	0001	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.00 Laporan	12 Laporan	100%	12.00 Laporan		0%
2	18	01	2.08	0002	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12.00 Laporan	12 Laporan	100%	12.00 Laporan		0%
2	18	01	2.08	0004	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			40.00 Laporan	40 Laporan	100%	40.00 Laporan		0%
2	18	01	2.09		**8**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0%

Kode					No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	18	01	2.09	0001	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			20.00 Unit	16 Unit	84%	20.00 Unit		0%
2	18	01	2.09	0005	-	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			4.00 Unit	4 Unit	100%	4.00 Unit		0%
2	18	01	2.09	0006	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit		0%
2	18	01	2.09	0009	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			200 Unit	160 Unit	80%	200 Unit		0%
2	18	01	2.09	0010	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2.00 Unit	2 Unit	100%	2.00 Unit		0%

Kode					No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	18	02			II	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota**			**4 Persen**					
							Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)			**8,46 T**					
							Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar rupiah)			**10 Persen**					
2	18	02	2.01		**9**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Kebijakan dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
2	18	02	2.01	0001	-	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		0%

Kode					No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Penanaman Modal	Penanaman Modal								
2	18	02	2.01	0005	-	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah			4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen		0%
2	18	02	2.02		**10**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
2	18	02	2.02	0001	-	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		0%
2	18	02	2.02	0004	-	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi			2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen		0%

Kode					No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota								
2	18	03			**III**	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Persentase peningkatan investasi di daerah setelah promosi**			**1 Persen**	**1 Persen**	**100,00%**	**1 Persen**		
							Jumlah investor baru yang masuk setelah promosi			**1 Investor**	**1 Investor**	**100,00%**	**1 Investor**		
							Nilai realisasi investasi yang tercapai setelah kegiatan promosi			**10 Milyar Rp.**	**9 Milyar Rp.**	**90,00%**	**10 Milyar Rp.**		
2	18	03	2.01		**11**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen strategi dan promosi investasi yang yang selaras dengan potensi investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	0%

Kode					No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	18	03	2.01	0002	-	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		0%
2	18	03	2.01	0003	-	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		0%
2	18	04			**IV**	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan**			**97 Persen**	**96,12 Persen**	**99,09%**	**97 Persen**		
							Persentase jumlah izin usaha yang diverifikasi			**52 Persen**	**51,8 Persen**	**99,62%**	**54 Persen**		
2	18	04	2.01		**12**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang**	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Yang Dilayani	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%

Kode					No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									
2	18	04	2.01	0005	-	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			4916 Pelaku Usaha	4429 Pelaku Usaha	90,09%			0%
2	18	04	2.01	0006	-	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			35 Pelaku Usaha	31 Pelaku Usaha	88,57%			0%

Kode					No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	18	04	2.01	0007	-	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			25 Kegiatan Usaha	25 Kegiatan Usaha	100,00%			0%
2	18	05			**V**	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Rasio daya serap tenaga kerja**			**19 Persen**	**17,37 Persen**	**91,42%**			
							Persentase penyelesaian permasalahan investasi yang ditangani			**81 Persen**	**80 Persen**	**98,77%**			
							Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi investasi/pen			**55 Persen**	**55,78 Persen**	**101,44%**			

Kode					No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							anaman modal								
2	18	05	2.01		**13**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**19 Persen**	**17,37 Persen**	**0,914210526**	**1 Dokumen**	0 Dokumen	0%
2	18	05	2.01	0004	-	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			12 Kegiatan Usaha.	12 Kegiatan Usaha.	100,00%			0%

Kode					No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	18	05	2.01	0005	-	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100,00%			0%
2	18	05	2.01	0006	-	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi			25 Kegiatan Usaha	26 Kegiatan Usaha	104,00%			0%

Kode					No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha								
2	**18**	**06**			**V**	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal**	**Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan**	**100.00 Persen**		**100.00 Persen**	**100.00 Persen**	**100%**			
2	18	06	2.01		**14**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat DaerahKabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	3 Dokumen	0 Dokumen	0%

Kode					No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	18	06	2.01	0002	-	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			3 Dokumen	3 Dokumen	100%			0%

Sumber : data diolah DPMPTSP, 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 memuat tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Purwakarta. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya mengangkat isu strategis keempat yaitu Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat. Dengan sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian” dimana indikator tujuan/sasarannya yaitu: Inflasi, Pendapatan perkapita / PDRB ADBH, Kontribusi Sektor

Perdagangan dan Industri terhadap PDRB dan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN. Adapun strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan membangun iklim investasi yang kondusif untuk peningkatan investasi daerah yang menjadi tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sebagai bagian dari agenda nasional peningkatan investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta memiliki peran sentral dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan. Penanaman modal merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, secara khusus data urusan penanaman modal terbagi menjadi data realisasi investasi dan pelayanan perizinan.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun)			6,73	7,2	7,7	8,12	4,07	8,3	8,7	
			Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	5,6	5,8	6	-45,32	-43,45%	5	5	
			Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	6,73	7,2	7,7	8,12	4,07	8,3	8,7	
			Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	730	803	884	723	371	850	900	
			Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	28,5	29	29.5	33,81	-23,76	30	15	
			Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	2	2	2	2	0	2	2	
			Nilai Minat Investasi Berdasarkan Lokasi dan Sektor (Triliun)	7,4	7,9	8,4	34,7	4,07	16	18	
			Rasio daya serap tenaga kerja	18,5	19	19,5	34,5	6,9	19	19,5	
			Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	7,14	8,7	8,7	8	0,8	12	13	
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)			95,41	96,91	98,41	96,5	96,14	Sangat Baik	Sangat Baik	
			Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan	94,58	95,58	96,58	97	96	97	97	
			Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	100	100	100	100	25	100	100	
3	Capaian SAKIP Perangkat Daerah			A	AA	AA	AA	BB	A	A	

Sumber : data diolah DPMPTSP, 2025

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan data realisasi investasi Tahun 2025 sesuai sektor usaha dapat digambarkan berikut ini;

Tabel 2.4

Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2025

No	SEKTOR INVESTASI	TAHUN 2025		Grand Total
		PMA	PMDN	
1	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	3.151.755.746,00	3.867.632.690.825,00	3.870.784.446.571,00
2	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1.295.246.765.519,00	-	1.295.246.765.519,00
3	Industri Karet dan Plastik	211.303.943.802,00	757.437.924.293,00	968.741.868.095,00
4	Industri Tekstil	367.953.833.221,00	547.415.630.706,00	915.369.463.927,00
5	Konstruksi	-	832.130.085.570,00	832.130.085.570,00
6	Industri Kertas dan Percetakan	546.943.702,00	785.370.157.967,00	785.917.101.669,00
7	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	99.280.000,00	743.360.942.195,00	743.460.222.195,00
8	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	140.013.796.180,00	569.734.967.576,00	709.748.763.756,00
9	Industri Kimia Dan Farmasi	312.216.128.404,00	256.250.400.616,00	568.466.529.020,00
10	Perdagangan dan Reparasi	8.444.252.173,00	328.949.352.158,00	337.393.604.331,00
11	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	n 277.559.131.300,00	11.568.017.012,00	289.127.148.312,00
12	Industri Mineral Non Logam	-	253.085.368.418,00	253.085.368.418,00
13	Jasa Lainnya	113.340.044.006,00	98.839.696.667,00	212.179.740.673,00
14	Listrik, Gas dan Air	44.654.325.948,00	100.975.874.021,00	145.630.199.969,00
15	Hotel dan Restoran	6.599.253.808,00	129.014.718.829,00	135.613.972.637,00
16	Industri Makanan	12.922.903.707,00	120.662.224.153,00	133.585.127.860,00
17	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	47.099.578.818,00	32.824.099.879,00	79.923.678.697,00
18	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	35.976.482.785,00	32.102.377.089,00	68.078.859.874,00

No	SEKTOR INVESTASI	TAHUN 2025		Grand Total
		PMA	PMDN	
19	Industri Lainnya	16.309.181.455,00	50.543.949.173,00	66.853.130.628,00
20	Pertambangan	-	40.683.394.526,00	40.683.394.526,00
21	Kehutanan	-	20.333.873.876,00	20.333.873.876,00
Grand Total		2.893.437.600.574,00	9.578.915.745.549,00	12.472.353.346.123,00

Berikut analisis komprehensif dan tajam atas kinerja Realisasi Investasi Tahun 2025:

I. Analisis Deskriptif

1. Struktur Total Investasi

- Total investasi: Rp 12,47 Triliun
- PMDN (domestik): Rp 9,58 Triliun (76,8%)
- PMA (asing): Rp 2,89 Triliun (23,2%)

Struktur investasi sangat didominasi PMDN, menunjukkan ketahanan ekonomi lokal cukup kuat, namun daya tarik terhadap investor asing masih terbatas.

2. Sektor Penyumbang Terbesar

Top 5 sektor (kontributor utama):

1. Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi
   Rp 3,87 T (31,0%)
2. Industri Kulit dan Alas Kaki
   Rp 1,29 T (10,4%)
3. Industri Karet dan Plastik
   Rp 968 M (7,8%)
4. Industri Tekstil
   Rp 915 M (7,3%)
5. Konstruksi
   Rp 832 M (6,7%)

Sektor logistik dan konektivitas mendominasi secara ekstrem akan tetapi struktur ekonomi cenderung:

- Padat karya (tekstil, alas kaki)

- Manufaktur menengah
- Infrastruktur/logistik-driven

3. Sektor dengan Kontribusi Rendah
   - Kehutanan: Rp 20 M
   - Pertambangan: Rp 40 M
   - Industri mesin & elektronik: Rp 68 M
   - Industri logam dasar: Rp 79 M

   Sektor *high-tech* dan hilirisasi masih sangat lemah serta struktur industri belum naik ke *value chain* tinggi.

II. Analisis Pola PMA vs PMDN

1. Sektor Bergantung PMDN

   Beberapa sektor hampir sepenuhnya domestik:
   - Konstruksi
   - Perumahan & kawasan industri
   - Mineral non logam
   - Transportasi (dominan PMDN)

   Sektor-sektor tersebut lebih aman oleh investor local ataupun kurang menarik bagi investor global (regulasi, ROI, atau risiko)

2. Sektor Berbasis PMA
   - Industri kulit & alas kaki (100% PMA)
   - Tanaman pangan (dominan PMA)
   - Kimia & farmasi (cukup seimbang)

   Makna strategis bahwa Perusahaan Modal Asing (PMA) cenderung masuk pada sektor yang bersifat *Ekspor-oriented* dan Padat karya *global supply chain.*

III. Analisis Struktural Ekonomi Daerah

1. Ketergantungan pada Sektor Tertentu

   Lebih dari 30% investasi terkonsentrasi di 1 sektor (transportasi & logistik). Hal ini menimbulkan risiko investasi yaitu investasi rentan terhadap perubahan kebijakan logistik, perlambatan distribusi barang dan kurang diversifikasi ekonomi.

2. Karakteristik Ekonomi

   Struktur investasi menunjukkan:

   - *Industrial base*: tekstil, plastik, alas kaki
   - *Supporting sector*: logistik, konstruksi
   - *Weak sector*:
     - teknologi tinggi
     - energi strategis
     - pertanian modern

3. Indikasi Tahap Pembangunan Ekonomi

   Daerah berada pada fase *Industrializing economy (middle stage).* Hal ini terlihat dari realisasi investasi masih didominasi manufaktur dasar dan belum masuk ke industri berbasis inovasi.

IV. Permasalahan Utama

1. Ketimpangan Struktur Investasi
   - Konsentrasi tinggi pada sektor tertentu
   - Minim diversifikasi sektor unggulan
2. Rendahnya PMA di Sektor Strategis
   - Teknologi, energi, dan industri berat masih rendah
   - Potensi belum tergarap
3. Lemahnya Hilirisasi
   - Industri masih dominan low–medium value
   - Investasi di Kabupaten Purwakarta belum menunjukan:

- **Hilirisasi industri**

  Hilirisasi industri merupakan strategi transformasi ekonomi yang berfokus pada peningkatan nilai tambah sumber daya melalui pengolahan lanjutan, dari bahan mentah menjadi produk antara hingga produk jadi yang memiliki daya saing tinggi di pasar domestik maupun global. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi daerah agar lebih resilien dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan daerah, hilirisasi menjadi instrumen kunci untuk mengatasi permasalahan klasik, yaitu ketergantungan pada sektor primer dan industri berorientasi bahan baku (*raw material based*). Tanpa hilirisasi, nilai ekonomi terbesar justru dinikmati oleh wilayah atau negara lain yang melakukan proses lanjutan. Oleh karena itu, hilirisasi berfungsi sebagai pengungkit peningkatan daya saing daerah. Berdasarkan struktur realisasi investasi tahun 2025, terlihat bahwa investasi masih didominasi oleh sektor manufaktur menengah dan padat karya seperti tekstil, alas kaki, serta industri karet dan plastik. Di sisi lain, sektor dengan karakteristik industri lanjutan berbasis teknologi dan inovasi masih relatif terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa proses hilirisasi belum berjalan optimal, khususnya dalam mendorong terbentuknya rantai nilai industri yang terintegrasi.

  Secara strategis, hilirisasi industri memiliki beberapa dampak utama, antara lain:

  1. Peningkatan nilai tambah ekonomi, melalui konversi bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi;
  2. Penciptaan lapangan kerja berkualitas, terutama pada sektor manufaktur lanjutan dan industri berbasis

teknologi;

3. Penguatan struktur industri daerah, dari yang semula berbasis ekstraktif menjadi berbasis produksi dan inovasi;
4. Peningkatan ekspor dan substitusi impor, sehingga memperbaiki neraca perdagangan daerah.

Namun demikian, implementasi hilirisasi menghadapi sejumlah tantangan, seperti:

- Keterbatasan infrastruktur industri dan logistik terintegrasi
- Ketersediaan teknologi dan SDM industri yang belum memadai
- Belum optimalnya keterkaitan antara sektor hulu dan hilir (*supply chain fragmentation*)
- Minimnya insentif investasi untuk industri lanjutan

Untuk itu, diperlukan kebijakan yang terarah dan terintegrasi, antara lain:

- Pengembangan kawasan industri berbasis hilirisasi (industrial cluster) sesuai potensi unggulan daerah
- Peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi industri pengolahan lanjutan
- Penguatan kemitraan antara industri besar, UMKM, dan lembaga riset
- Integrasi kebijakan investasi dengan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD)
- Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri

Dengan demikian, hilirisasi industri tidak hanya dipandang sebagai kebijakan sektoral, melainkan sebagai strategi transformasi ekonomi daerah yang berorientasi pada

peningkatan produktivitas, efisiensi investasi (penurunan ICOR), serta penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

- ***Advanced Manufacturing***

  Advanced manufacturing merupakan paradigma baru dalam pembangunan industri yang menekankan pada pemanfaatan teknologi canggih, otomatisasi, digitalisasi, dan integrasi sistem produksi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, serta nilai tambah produk. Konsep ini mencakup penerapan teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan (AI), robotika, *big data analytics*, dan *additive manufacturing* (3D printing) dalam proses produksi. Dalam konteks transformasi ekonomi daerah, *advanced manufacturing* menjadi tahapan lanjutan dari industrialisasi konvensional menuju industri berbasis inovasi dan teknologi tinggi (*high value-added industry*). Pergeseran ini penting untuk menghindari jebakan *middle-income trap*, di mana daerah hanya bertumpu pada industri padat karya dengan produktivitas rendah. Berdasarkan struktur realisasi investasi tahun 2025, terlihat bahwa perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor manufaktur tradisional dan padat karya seperti tekstil, alas kaki, serta industri berbasis bahan baku. Sementara itu, sektor yang mencerminkan karakteristik advanced manufacturing, seperti industri mesin, elektronik, dan peralatan presisi, masih memiliki kontribusi yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi menuju industri modern belum optimal.

  Penerapan advanced manufacturing memberikan dampak strategis sebagai berikut:

  1. Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi

Otomatisasi dan digitalisasi memungkinkan proses produksi yang lebih cepat, presisi tinggi, dan minim kesalahan.

2. Peningkatan Nilai Tambah Industri
   Produk yang dihasilkan memiliki kualitas lebih tinggi dan mampu bersaing di pasar global.
3. Penguatan Daya Saing Investasi
   Daerah yang mengadopsi advanced manufacturing lebih menarik bagi investor global berbasis teknologi.
4. Penurunan ICOR (Efisiensi Investasi)
   Investasi yang masuk menghasilkan output ekonomi yang lebih besar dan berkelanjutan.

Beberapa kendala utama dalam pengembangan *advanced manufacturing* di Kabupaten Purwakarta meliputi:

- Keterbatasan SDM terampil berbasis teknologi
- Akses terhadap teknologi dan pembiayaan yang masih terbatas
- Kesiapan infrastruktur digital yang belum merata
- Minimnya ekosistem inovasi dan riset industri
- Dominasi industri berorientasi tenaga kerja murah

Untuk mendorong transformasi menuju *advanced manufacturing*, diperlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Transformasi Industri Eksisting
   - Modernisasi industri tekstil, alas kaki, dan plastik melalui:
     - otomatisasi produksi
     - digitalisasi rantai pasok
     - penggunaan smart factory
2. Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Teknologi

- Mendorong pembentukan techno-industrial park
- Integrasi dengan pusat riset dan pendidikan vokasi

3. Peningkatan Kapasitas SDM
   - Pelatihan vokasi berbasis industri 4.0
   - Link and match dengan dunia usaha dan industri
4. Insentif Investasi Teknologi Tinggi
   - Pemberian kemudahan perizinan dan fiskal
   - Prioritas pada sektor:
     - elektronik
     - otomotif modern
     - alat kesehatan
     - *renewable energy equipment*
5. Penguatan Ekosistem Inovasi

   Kolaborasi antara: pemerintah, industri dan perguruan tinggi serta pengembangan pusat inovasi daerah.

Pengembangan advanced manufacturing merupakan keharusan dalam mendorong transformasi ekonomi daerah menuju industri berbasis teknologi dan nilai tambah tinggi. Tanpa langkah ini, daerah akan tetap terjebak dalam struktur ekonomi berbiaya rendah dengan produktivitas terbatas.

V. Interpretasi Strategis

Jika tidak ada intervensi terhadap realisasi investasi maka risiko ekonomi akan stagnan di sektor padat karya serta rentan terhadap relokasi industri global yang akan mengakibatkan daya saing daerah akan tertinggal dari kawasan industri maju seperti halnya sekarang ini posisi daya saing Kabupaten Purwakarta sedikit tertinggal dari Kabupaten yang berdekatan terutama Kabupaten Subang yang telah berkembang kearah tersebut.

VI. Rekomendasi Kebijakan

1. Diversifikasi Investasi

   Fokus dalam menarik investasi pada sektor : industri mesin & elektronik, energi terbarukan dan industri berbasis teknologi

2. Strategi Peningkatan PMA
   - Penyederhanaan perizinan berbasis risiko (OSS RBA)
   - Penyiapan investment project ready to offer (IPRO)
   - Promosi berbasis sektor unggulan spesifik
3. Penguatan Hilirisasi Industri
   - Integrasi dengan kebijakan nasional (hilirisasi)
   - Insentif untuk:
     - industri turunan plastik
     - tekstil ke produk jadi bernilai tinggi
4. Pengembangan Kawasan Industri Tematik
   - Kawasan industri:
     - berbasis logistik
     - berbasis manufaktur ekspor
     - berbasis green industry
5. Transformasi Struktur Ekonomi

   Dari industry yang bersifat padat karya menuju industri padat teknologi & nilai tambah

VII. Kesimpulan Strategis

Investasi 2025 kuat secara nominal, tetapi belum berkualitas tinggi dan masih terkonsentrasi. Untuk itu dibutuhkan transformasi struktur investasi, bukan sekadar peningkatan nilai.

Indikator Kinerja utama lainnya adalah Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dapat didefinisikan sebagai data dan informasi tentang tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 adalah sebesar 96,6 poin atau sangat baik, nilai tersebut sesuai target yaitu prikat sangat baik. Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh memperlihatkan bahwa setiap evaluasi yang dilaksanakan per triwulan pada tahun 2025 pelayanan perizinan yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta selalu berada pada kategori "SANGAT BAIK". Hal ini menunjukan bahwa persepsi masyarakat pengguna layanan perizinan terhadap kualitas layanan telah memenuhi harapan yang diinginkan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan menurut pemerintah adalah berdasarkan indeks kepuasan masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, satuan kerja atau kantor pelayanan pada instansi pemerintah yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Survei kepuasan masyarakat tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta adalah memberikan layanan administrasi terhadap kegiatan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta berupa pelayanan perizinan yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan penanaman modal.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi berkaitan dengan urusan penanaman modal.

1. Pengembangan Iklim Investasi

   Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal tersebut, mempengaruhi keinginan penanam modal untuk melakukan kegiatan penanaman modal, berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan.

   Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal pula bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional dan internasional namun perbedaan karakteristik memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal. Beberapa permasalahan terkait pengembangan iklim investasi:

a) Ketidakpastian Regulasi dan Inkonsistensi Kebijakan

Permasalahan:

- Seringnya perubahan regulasi penanaman modal di tingkat pusat maupun daerah tanpa sinkronisasi terutama dalam regulasi perizinan pengambilan air tanah.
- Tumpang tindih antara regulasi investasi dan LP2B.
- Lemahnya kepastian hukum, terutama dalam proses perizinan dan pasca-investasi.

b) Ketersediaan dan Kepastian Lahan Investasi

Permasalahan:

- Tidak tersedianya data lahan yang siap investasi (land bank).
- Konflik lahan antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha.
- Proses pembebasan lahan yang lambat dan tidak transparan.

Dampak:

- Terhambatnya pengembangan proyek strategis daerah.
- Meningkatkan risiko sosial-politik.
- Investor berpindah ke daerah lain yang lebih siap.

c) Lemahnya Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Level Pemerintahan

Permasalahan:

- Ego sektoral antar perangkat daerah (OPD) dan minimnya forum koordinasi investasi.
- Lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan investasi.
- Perencanaan sektoral tidak terintegrasi dengan agenda penanaman modal.

Dampak:

- Implementasi kebijakan investasi menjadi parsial dan tidak efisien.
- Tertundanya pengambilan keputusan penting bagi investor.
- Program dan kegiatan bersifat *bussines as usual.*

d) Promosi Investasi yang Tidak Terarah dan Tidak Berbasis Data

Permasalahan:

- Kegiatan promosi belum berbasis pada market intelligence dan sektor unggulan daerah.
- Belum ada dokumen proyek siap tawar (*Investment Project Ready to Offer – IPRO*).

Dampak:

- Daerah kalah bersaing dengan daerah lain di ASEAN dalam menarik FDI.
- Investor tidak memiliki informasi cukup untuk membuat keputusan investasi.
- Terlalu banyak promosi bersifat seremonial tanpa dampak konkret.

e) Rendahnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan

Permasalahan:

- Kurangnya SDM yang memahami teknis investasi, fasilitasi, dan pelayanan prima.
- Belum optimalnya pemanfaatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal (PKPM).
- Struktur organisasi DPMPTSP tidak semua mendukung fungsi strategis investasi (seperti desk investasi, tim fasilitasi, dan promosi digital).

Dampak:

- Investasi berkualitas sulit masuk karena tidak ditangani secara profesional.
- Tidak ada unit khusus yang menangani investor secara intensif.
- Kinerja DPMPTSP dinilai stagnan atau administratif semata.

f) Rendahnya Kepatuhan Dunia Usaha terhadap Ketentuan Penanaman Modal

Permasalahan:

- Banyak pelaku usaha tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- Tidak mematuhi ketentuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL),

ketenagakerjaan, dan TKDN.

- Minimnya edukasi dan pengawasan pasca-izin

Dampak:

- Terjadi penyimpangan pelaksanaan investasi.
- Data realisasi investasi tidak akurat dan tidak dapat dijadikan dasar kebijakan.

g) Terbatasnya Akses Informasi dan Infrastruktur Pendukung

Permasalahan:

- Kurangnya informasi spasial berbasis geodata terkait lokasi strategis investasi.
- Keterbatasan infrastruktur dasar (exit tol, air, listrik, jalan, internet)
- Pengembangan platform digital satu pintu investasi belum maksimal

Dampak:

- Investor sulit melakukan *due diligence.*
- Biaya logistik dan operasional tinggi.
- Daerah dianggap tidak siap menyambut investasi.

h) Keterbatasan Dukungan Insentif dan Pembiayaan

Permasalahan:

- Skema insentif daerah belum tersedia sehiingga tidak kompetitif dibandingkan daerah lain.
- Lemahnya sinergi antara BUMD, lembaga pembiayaan daerah, dan Perbankan.
- Tidak adanya dukungan khusus untuk UMKM lokal agar terlibat dalam rantai pasok investasi.

Dampak:

- Investor memilih lokasi lain yang lebih menarik.
- UMKM tidak mendapatkan manfaat dari investasi besar yang masuk.
- Daerah kehilangan potensi pajak dan retribusi secara tidak langsung

Permasalahan dan hambatan pengembangan iklim investasi memerlukan pendekatan *multi-sektor*, *multi-level*, dan *berbasis data*. Penanganannya harus melibatkan sinergi antara pemerintah pusat,

antar OPD, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Kunci utamanya terletak pada kepemimpinan daerah yang pro-investasi, mengkolaborasi antar OPD, konsistensi regulasi, dan reformasi kelembagaan yang adaptif terhadap kebutuhan investor.

2. Penguatan Sumber Daya Manusia.

Salah satu tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah melakukan pelayanan publik dibidang pelayanan penanaman modal dan perizinan dalam rangka meningkatkan investasi untuk mendorong perekonomian nasional dan regional. Kedua tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan membangun sumber daya manusia di Kabupaten Purwakarta, baik sumber daya aparatur maupun sumber daya pekerja dan pelaku usaha. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta memiliki sumber daya manusia dengan kualitas yang cukup tinggi sehingga dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berjalan efektif. Walaupun begitu, kondisi ini tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sumber daya aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur secara simultan sehingga dapat menjadikan Kabupaten Purwakarta sebagai DPMPTSP yang berkinerja optimal terutama dalam realisasi investasi. Salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk menguatkan SDM adalah dengan mengalihkan jabatan struktural kepada jabatan fungsional yang bertujuan agar birokrasi di kalangan pemerintah menjadi semakin dinamis sehingga memutuskan rantai birokrasi penghambat investasi. Kebijakan penyederhanaan birokrasi yang mentransformasikan tata lembaga pemerintahan dari struktural menjadi fungsional memerlukan antisipasi pada sisi perencanaan di bidang anggaran dan kepegawaian. Perhitungan cermat dari

kebutuhan pegawai dan pengembangan kompetensinya perlu diiringi oleh kemampuan anggaran dinas. Disisi lain, kualitas sumber daya manusia pekerja juga perlu diperhatikan.

Disamping hal tersebut, peningkatan SDM masayarakat perlu ditingkatkan. Saat ini, data BPS menunjukan bahwa angka pengangguran tertinggi di Kabupaten Purwakarta berasal dari lulusan SMK yang belum bekerja, padahal SMK sendiri merupakan pendidikan semi vokasi dimana para lulusannya diproyeksikan untuk langsung bekerja setelah menyelesaikan pendididkannya. Hal ini dapat berdampak sangat negatif terhadap pertumbuhan penanaman modal dikarenakan para investor baik dari dalam maupun luar negeri akan bersedia menanamkan modalnya apabila syarat tenaga kerja terpenuhi. Apabila tenaga kerja yang tersedia tidak memenuhi syarat, maka mereka akan mengimpor tenaga kerja dari daerah lain yang mengakibatkan penduduk pribumi hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Sehingga pada akhirnya iklim investasi akan memburuk dan para investor akan hengkang dari Kabupaten ini.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah terkait Pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha secara terpadu yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu bentuk dan wujud nyata dari upaya pemerintah daerah untuk melayani masyarakatnya, sehingga pelayanan perizinan menjadi ujung tombak dalam menggerakan perekonomian masyarakat serta memudahkan investor dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Purwakarta, sehinggga terwujud komitmen pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

secara cepat,mudah dan transparan. Strategis dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah pemberian award kepada pelaku usaha yang melaksanakan kepatuhan penanaman modal melalui ANVESTA Award, pengembangan/*Upgrading GASPOL* dan konten MPP Digital, dibentuknya Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha dalam usaha untuk pencapaian kemudahan berusaha dan peningkatan realisasi investasi yang melibatkan semua bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan lintas SKPD, lanjutan pelaksanaan forum penyelesaian masalah dan hambatan Investasi, komunikasi lintas stakeholders dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten, penyederhanaan regulasi investasi penanaman modal, peningkatan kompetensi melalui Diklat/pelatihan yang mengacu pada aktivitas unit layananan per bidang, kegiatan monitoring dan evaluasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang program dan kegiatan. Koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dan Kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga ditingkat pusat, dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan sudah bersinergi dengan mengacu kepada sasaran BKPM dan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dan kerjasama dalam peningkatan kemakmuran ekonomi dan adanya kegiatan Forum Koordinasi DPMPTSP yang dilakukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat provinsi yang diadakan setiap tahun.

4. Pengelolaan Data dan Informasi yang belum dimanfaatkan secara optimal, data merupakan aspek penting dalam urusan penanaman modal yang dapat memberikan dasar pengambilan keputusan baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha, pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan urusan penanaman modal belum tersedia secara lengkap dan akurat.

5. Pemberdayaan UMK melalui *Linkage* Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja.

   Pemberdayaan UMK (Usaha Mikro dan Kecil) melalui linkage investasi dan penyerapan tenaga kerja adalah penting karena berbagai alasan berikut :

   - Peningkatan Kapasitas dan Skala Usaha: Linkage investasi memungkinkan UMK untuk meningkatkan kapasitas produksi dan skala usahanya. Investasi dapat digunakan untuk membeli peralatan, teknologi baru, dan bahan baku yang lebih baik, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan produktivitas
   - Akses ke Pasar Lebih Luas: Melalui kemitraan dengan perusahaan besar dan investor, UMK dapat mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas dan lebih stabil. Hal ini membantu UMK untuk memperluas jangkauan produk dan layanan mereka, serta meningkatkan pendapatan.
   - Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan: Dengan dukungan dari investor dan perusahaan besar, UMK dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka melalui pelatihan, bimbingan, dan transfer teknologi. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing UMK di pasar lokal dan internasional.
   - Penyerapan Tenaga Kerja: Pemberdayaan UMK melalui linkage investasi secara langsung berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru. UMK yang berkembang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, yang membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
   - Peningkatan Keterampilan dan Kapasitas SDM: Kerjasama dengan investor dan perusahaan besar sering kali mencakup pelatihan dan pengembangan.
   - Pemberdayaan Ekonomi Lokal: UMK sering kali beroperasi di komunitas lokal dan memainkan peran penting dalam

perekonomian daerah. Pemberdayaan UMK melalui investasi membantu memperkuat ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan standar hidup masyarakat setempat.

- Diversifikasi Ekonomi: Dengan pemberdayaan UMK, perekonomian menjadi lebih beragam dan tidak terlalu tergantung pada sektor-sektor tertentu. Diversifikasi ini penting untuk ketahanan ekonomi, terutama dalam menghadapi krisis atau perubahan ekonomi global keterampilan bagi tenaga kerja UMK. Ini membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan menyiapkan mereka untuk pekerjaan yang lebih kompleks dan bernilai tambah tinggi.
- Inovasi dan Kreativitas: UMK sering kali menjadi sumber inovasi dan kreativitas. Dengan dukungan investasi, mereka dapat mengembangkan produk dan layanan baru yang unik dan berpotensi besar di pasar. Ini membantu memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dengan berbagai manfaat ini, pemberdayaan UMK melalui *linkage* investasi dan penyerapan tenaga kerja tidak hanya membantu UMK untuk tumbuh dan berkembang, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

6. Peningkatan Kemitraan UMK dan Pelaku Usaha Besar. Peningkatan kemitraan antara UMK (Usaha Mikro dan Kecil) dan pelaku usaha besar adalah penting karena berbagai alasan berikut:
   - Transfer Pengetahuan dan Teknologi: Kemitraan dengan pelaku usaha besar memungkinkan UMK untuk mendapatkan akses ke pengetahuan, teknologi, dan

praktik bisnis yang lebih maju. Ini membantu UMK meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk atau layanan mereka.

- Peningkatan Daya Saing: Dengan mendapatkan dukungan dan bimbingan dari pelaku usaha besar, UMK dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar. Ini pelaku usaha besar, UMK dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar. Ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan UMK dalam jangka panjang.
- Akses ke Rantai Pasok yang Lebih Luas: Melalui kemitraan ini, UMK dapat menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan besar. Ini membuka peluang untuk mendapatkan pesanan dalam jumlah besar dan jangka panjang, yang membantu meningkatkan stabilitas pendapatan UMK.
- Peningkatan Kualitas dan Standar: Pelaku usaha besar sering kali memiliki standar kualitas yang tinggi. Dengan bermitra, UMK didorong untukmeningkatkan standar produk dan layanan mereka untuk memenuhi ekspektasi tersebut, yang pada gilirannya meningkatkan reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap UMK
- Pengembangan Kapasitas SDM: Kemitraan ini sering kali mencakup program pelatihan dan pengembangan bagi karyawan UMK. Ini membantu meningkatkan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia UMK, yang penting untuk pertumbuhan dan inovasi.
- Diversifikasi Produk dan Pasar: Melalui kolaborasi dengan pelaku usaha besar, UMK memiliki peluang untuk diversifikasi produk dan masuk ke pasar baru yang sebelumnya sulit dijangkau. Ini membantu mengurangi risiko bisnis dan memperluas basis pelanggan.

- Peningkatan Modal dan Investasi: Kemitraan ini juga dapat membuka akses UMK terhadap modal dan investasi dari perusahaan besar. Ini sangat penting untuk ekspansi usaha dan peningkatan kapasitas produksi.
- Kolaborasi Inovatif: Kemitraan antara UMK dan pelaku usaha besar mendorong kolaborasi inovatif dalam pengembangan produk, layanan, dan model bisnis baru. Ini menciptakan nilai tambah yang signifikan dan membantu kedua belah pihak untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar.
- Peningkatan Keberlanjutan: Perusahaan besar sering kali memiliki inisiatif keberlanjutan yang dapat diadopsi oleh UMK melalui kemitraan. Ini membantu UMK menjalankan praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan dan sosial, yang semakin dihargai oleh konsumen dan pemangku kepentingan lainnya.
- Kontribusi pada Perekonomian Nasional: Kemitraan ini tidak hanya bermanfaat bagi UMK dan pelaku usaha besar, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian nasional. Dengan memperkuat UMK, yang merupakan tulang punggung ekonomi, dan mengintegrasikannya dengan pelaku usaha besar, tercipta ekosistem bisnis yang lebih solid dan dinamis.

Peningkatan kemitraan antara UMK dan pelaku usaha besar menghasilkan sinergi yang positif bagi kedua belah pihak dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

7. Penggalian Potensi Unggulan Investasi

Penggalian potensi unggulan investasi sangat penting dalam konteks pemerataan investasi karena beberapa alasan berikut:

- Pemanfaatan Sumber Daya Lokal: Setiap daerah memiliki keunikan dan keunggulan sumber daya yang bisa dimaksimalkan. Dengan mmengidentifikasi dan mengembangkan potensi unggulan investasi di setiap daerah, sumber daya lokal dapat dimanfaatkan secara optimal, yang berdampak positif pada perekonomian daerah tersebut.
- Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi: Penggalian potensi unggulan investasi membantu mendorong investasi ke daerah-daerah yang sebelumnya kurang berkembang. Hal ini membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi kesenjangan antara daerah maju dan daerah tertinggal.
- Penciptaan Lapangan Kerja Lokal: Dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan di berbagai daerah, lebih banyak lapangan kerja dapat diciptakan di tingkat lokal. Ini membantu mengurangi urbanisasi berlebihan dan menyeimbangkan distribusi penduduk serta tenaga kerja.
- Diversifikasi Ekonomi: Fokus pada potensi unggulan investasi membantu diversifikasi perekonomian daerah. Dengan tidak bergantung pada satu sektor atau komoditas saja, daerah menjadi lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi global dan krisis sektoral.
- Pengembangan Infrastruktur: Investasi di daerah yang memiliki potensi unggulan akan mendorong pengembangan infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas lainnya. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
- Peningkatan Pendapatan Daerah: Investasi yang diarahkan

pada potensi unggulan di daerah membantu meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Pendapatan ini dapat digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

- Penguatan Ekonomi Lokal: Dengan investasi yang terarah pada sektor unggulan, ekonomi lokal menjadi lebih kuat dan berdaya saing. Hal ini membantu menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan, mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menarik lebih banyak investor.
- Inovasi dan Teknologi: Penggalian potensi unggulan investasi mendorong adopsi teknologi dan inovasi di sektor-sektor kunci. Ini meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta menciptakan produk dan layanan baru yang memiliki nilai tambah tinggi.
- Peningkatan Kualitas Hidup: Investasi yang merata dan tepat sasaran dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah yang berkembang. Akses ke layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial menjadi lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan umum.
- Kolaborasi Antar Daerah: Dengan mengidentifikasi potensi unggulan masingmasing daerah, dapat terjalin kolaborasi dan sinergi antar daerah. Ini mendorong pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya, yang mempercepat pembangunan dan inovasi di tingkat nasional.

Dengan demikian, penggalian potensi unggulan investasi merupakan strategi penting untuk mencapai pemerataan investasi yang tidak hanya menguntungkan daerah-daerah tertentu, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi yang

inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

8. Penataan Regulasi dan Kebijakan

   Cepatnya perkembangan aturan perundangan terkait urusan penanaman modal yang diikuti dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang beserta turunan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, memberikan tugas kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait urusan penanaman modal dan perizinan berusaha. Hal ini menjada dasar DPMPTSP mendorong penataan peraturan peraturan perundang-undangan produk hukum daerah dalam rangka mempermudah penanaman modal yang dilakukan paling kurang dengan:

   a. Mereviu peraturan perundang-undangan produk hukum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dibidang penanaman modal;
   b. Melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan produk hukum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dibidang penanaman modal; dan
   c. Menyusun peraturan peraturan perundang-undangan produk hukum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dibidang penanaman modal dalam rangka mempermudah penanaman modal dengan memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Purwakarta.

9. Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal dan Perizinan

Penyelesaian permasalahan penanaman modal dan perizinan menjadi penting karena berbagai alasan yang berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi, iklim investasi, dan efisiensi administrasi. Pertama, permasalahan dalam penanaman modal dan perizinan sering kali menjadi hambatan utama bagi investor untuk menanamkan modal mereka. Ketika proses perizinan rumit, memakan waktu, dan tidak transparan, investor akan merasa ragu dan tidak yakin untuk berinvestasi. Hal ini mengakibatkan aliran investasi menurun, yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, permasalahan ini mempengaruhi persepsi internasional terhadap iklim bisnis suatu negara. Negara yang dikenal memiliki birokrasi yang rumit dan banyak hambatan dalam perizinan akan dianggap tidak ramah investasi, sehingga menurunkan daya tariknya di mata investor global. Penyelesaian masalah ini meningkatkan citra negara sebagai destinasi investasi yang menarik dan kompetitif. Selanjutnya, masalah dalam penanaman modal dan perizinan dapat menghambat pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). UMKM sering kali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menghadapi prosedur yang rumit dan memakan waktu, yang membuat mereka sulit berkembang. Penyelesaian permasalahan ini akan memberikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi UMKM untuk mendapatkan izin usaha dan memanfaatkan peluang investasi, sehingga mendukung pertumbuhan dan daya saing mereka. Dari perspektif administrasi, penyelesaian masalah penanaman modal dan perizinan juga penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan. Proses perizinan yang lancar dan efisien mengurangi potensi korupsi dan

penyalahgunaan wewenang. Dengan prosedur yang jelas dan transparan, pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pelaku usaha, membangun kepercayaan publik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk bisnis. Secara keseluruhan, penyelesaian permasalahan penanaman modal dan perizinan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memperbaiki sistem ini, negara dapat menarik lebih banyak investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing global, mendukung UMKM, dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

2.3.3. Dampak Realisasi Investasi terhadap Perekonomian Kabupaten Purwakarta

Investasi merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Di Kabupaten Purwakarta, sektor investasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Sebagai salah satu wilayah industri utama di Provinsi Jawa Barat, dengan keberadaan beberapa kawasan industri, Purwakarta telah berkembang menjadi simpul ekonomi kawasan yang mengandalkan pergerakan investasi swasta, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Namun, penurunan investasi secara signifikan akan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap struktur dan dinamika ekonomi daerah. Dampak tersebut tidak hanya bersifat sektoral, melainkan juga lintas sektor yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi daerah secara menyeluruh, memperlemah kinerja pembangunan, dan berpotensi memperluas kesenjangan sosial.

Meski mengalami pertumbuhan secara nominal, laju pertumbuhan ekonomi Purwakarta justru mengalami perlambatan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku naik dari Rp76,47 triliun pada 2022 menjadi Rp88,25 triliun pada 2024 dan Rp89,22 triliun pada tahun 2025. Namun, pertumbuhan ekonomi tahunan menunjukkan tren melambat, dari 5,24 (2022), ke 4,97 (2023), lalu turun lagi menjadi 4,64pada 2024 dan naik Kembali menjadi 5,26 pada Tahun 2025.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun signifikan dari 8,75 pada 2022 menjadi 7,34 pada 2024, dan menjadi 7,54 pada tahun 2025.

DPMPTSP Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat memanfaatkan capaian positif sebagai fondasi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan memperkuat sektor sektor pendukung peningkatan investasi.

2.4. Reviu Terhadap RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2027 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Purwakarta.

Pada tahun 2027 program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Purwakarta dilakukan penyelarasan dengan program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen RKPD Kab. Purwakarta, penyelarasan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025

tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang kemudian akan di sinkronisasi dengan Penetapan RKPD Kab. Purwakarta sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitif dijadikan rencana kerja tahun 2027.

Mengacu kepada RKPD Kabupaten Purwakarta, program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta terdiri dari 6 (enam) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan, berikut matrikulasi reviu program, kegiatan dan subkegiatan terhadap RKPD Tahun 2027.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027 berdasarkan hasil analisis kebutuhan terdiri dari 6 (enam) program, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang dilaksanakan melalui 14 (empat belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan.
3. Program Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal yang dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.
6. Program Pengelola Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Tabel 2.5
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 Kabupaten Purwakarta

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	Target		Hasil Analisis Kebutuhan	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
2.18	**BIDANG PENANAMAN MODAL**	**Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)**	**Trilyun Rp.**	**9,14**	**17.180.139.148**	**13,45**	**17.180.139.148**
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	**Predikat**	**Sangat Baik**		**Sangat Baik**	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	**Predikat**	**AA**		**AA**	
2.18.02	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				670.000.000		670.000.000
		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	5,00		5,00	
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Trilyun Rp.	9,14		9,14	
		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar rupiah)	Persen	11,00		11,00	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				350.000.000		350.000.000
		Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Dokumen	1,00		1,00	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				150.000.000		150.000.000
		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1,00		1,00	
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota				200.000.000		200.000.000

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	Target		Hasil Analisis Kebutuhan	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	6,00		6,00	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				320.000.000		320.000.000
		Jumlah Dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	2,00		2,00	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000
		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00		1,00	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				220.000.000		220.000.000
		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	4,00		4,00	
2.18.03	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				500.000.000		500.000.000
		Persentase peningkatan investasi di daerah setelah promosi	Persen	1,00		1,00	
		Jumlah investor baru yang masuk setelah promosi	Investor	1,00		1,00	
		Nilai realisasi investasi yang tercapai setelah kegiatan promosi	Milyar Rp.	50,00		50,00	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000		500.000.000
		Jumlah Calon Investor yang mendapatkan Informasi Potensi dan Peluang Investasi	Calon Investor	10,00		10,00	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				400.000.000		400.000.000

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	Target		Hasil Analisis Kebutuhan	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2,00		2,00	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000
		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	2,00		2,00	
2.18.05	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				585.000.000		585.000.000
		Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	20,00		20,00	
		Persentase penyelesaian permasalahan investasi yang ditangani	Persen	83,00		83,00	
		Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi investasi/penanaman modal	Persen	65,00		65,00	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				585.000.000		585.000.000
		Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	3,00		3,00	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				160.000.000		160.000.000
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	18,00		18,00	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				275.000.000		275.000.000

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	Target		Hasil Analisis Kebutuhan	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku usaha	275,00		275,00	
	Pengawasan Penanaman Modal				150.000.000		150.000.000
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	70,00		70,00	
2.18.04	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				650.000.000		650.000.000
		Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan	Persen	97,00		97,00	
		Persentase jumlah izin usaha yang diverifikasi	Persen	56,00		56,00	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				650.000.000		650.000.000
		Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Yang Dilayani	Persen	5,00		5,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				100.000.000		100.000.000
		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	12,00		12,00	

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	Target		Hasil Analisis Kebutuhan	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				300.000.000		300.000.000
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku usaha	4.995,00		4.995,00	
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				100.000.000		100.000.000
		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku usaha	75,00		75,00	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				150.000.000		150.000.000
		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	kegiatan usaha	200,00		200,00	
2.18.06	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				350.000.000		350.000.000
		Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Persen	100,00		100,00	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				350.000.000		350.000.000

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	Target		Hasil Analisis Kebutuhan	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
		Jumlah Laporan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Laporan	4,00		4,00	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				350.000.000		350.000.000
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	3,00		3,00	
1.01.01	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.425.139.148		14.425.139.148
		Capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persen	94,55		94,55	
		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang berfungsi optimal	Persen	73,00		73,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				127.083.081		127.083.081
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	3,00		3,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				30.000.000		30.000.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2,00		2,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				10.000.000		10.000.000

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	Target		Hasil Analisis Kebutuhan	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00		1,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				10.083.081		10.083.081
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,00		1,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Kinerja SKPD				22.000.000		22.000.000
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1,00		1,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40.000.000		40.000.000
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4,00		4,00	
	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja Pd				15.000.000		15.000.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang Disusun	Dokumen	1,00		1,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.444.053.307		8.444.053.307
		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	3,00		3,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.369.053.307		8.369.053.307

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	Target		Hasil Analisis Kebutuhan	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	50,00		50,00	
X.XX.01.2.02.0003	Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			45.000.000		45.000.000
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1,00		1,00	
X.XX.01.2.02.0004	Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			10.000.000		10.000.000
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1,00		1,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			10.000.000		10.000.000
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00		1,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			10.000.000		10.000.000
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3,00		3,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			50.000.000		50.000.000
	Jumlah Kegiatan Barang Milik Daerah Yang Teradministrasi Tepat Waktu	Kegiatan	1,00		1,00	

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	Target		Hasil Analisis Kebutuhan	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000		20.000.000
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00		1,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				30.000.000		30.000.000
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00		1,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				370.400.000		370.400.000
		Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Yang Dilaksanakan	Kegiatan	3,00		3,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				180.000.000		180.000.000
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00		2,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				180.400.000		180.400.000
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30,00		30,00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				10.000.000		10.000.000
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4,00		4,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				705.000.000		705.000.000
		Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	Kegiatan	8,00		8,00	

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	Target		Hasil Analisis Kebutuhan	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				60.000.000		60.000.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00		1,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000		50.000.000
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,00		1,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				250.000.000		250.000.000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2,00		2,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				125.000.000		125.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00		1,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.000.000		10.000.000
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5,00		5,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		10.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1,00		1,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				170.000.000		170.000.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120,00		120,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30.000.000		30.000.000

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	Target		Hasil Analisis Kebutuhan	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00		1,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				450.000.000		450.000.000
		Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	2,00		2,00	
	Pengadaan Mebel				150.000.000		150.000.000
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4,00		4,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				300.000.000		300.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30,00		30,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.439.202.760		3.439.202.760
		Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional Dinas Yang Dilaksanakan	Kegiatan	3,00		3,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.250.000		5.250.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00		12,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				767.760.000		767.760.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00		12,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.666.192.760		2.666.192.760

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	Target		Hasil Analisis Kebutuhan	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00		12,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				839.400.000		839.400.000
		Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	5,00		5,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				46.400.000		46.400.000
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3,00		3,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				93.000.000		93.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11,00		11,00	
	Pemeliharaan Mebel				50.000.000		50.000.000
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4,00		4,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000		150.000.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	160,00		160,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				400.000.000		400.000.000

KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	Target		Hasil Analisis Kebutuhan	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
		Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	3,00		3,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1,00		1,00	

2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta merupakan paduan perencanaan yang bersifat *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPD, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui musrenbang harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Dari Hasil usulan masyarakat yang dapat diakomodir dalam dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan ataupun penjaringan usulan lainnya yang dapat diselaraskan dengan sasaran dan tujuan serta program dan kegiatan Dinas.

Tabel 2.6
Penelaaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1,	Pelayanan Perizinan di Tempat	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan	insidential	Diakomodir dengan gempungan/ Permohonan
2.	Peningkatan sarana dan prasarana MPP Bale Madukara	MPP Bale Madukara			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penanaman modal menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, dan transformasi ekonomi. Dalam RPJMN 2025–2029, penanaman modal ditempatkan sebagai salah satu pilar strategis untuk mewujudkan *Indonesia Emas 2045* dengan menekankan akselerasi transformasi ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan nilai tambah sektor unggulan. Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dimana sasaran menengahnya adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk itu, sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Berikut adalah pokok-pokok arah kebijakan penanaman modal dalam RPJMN 2025–2029:

1. Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Investasi
    - Penyederhanaan regulasi melalui *omnibus law lanjutan* dan *regulatory reform*.
    - Penguatan sistem perizinan terintegrasi berbasis risiko (OSS-RBA).
    - Harmonisasi kebijakan pusat-daerah untuk menciptakan kepastian hukum investasi.

2. Peningkatan Promosi dan Fasilitasi Investasi
    - Strategi promosi investasi berbasis *market intelligence* dan sektor prioritas.
    - Peningkatan peran perwakilan RI di luar negeri dalam menarik FDI.
    - Fasilitasi investor melalui *investment helpdesk*, penyusunan proyek siap tawar (*IPRO/ Investment Project Ready to Offer*), dan pendampingan realisasi investasi.

3. Pemerataan Investasi dan Penguatan Daerah
    - Insentif untuk investasi di daerah tertinggal, perbatasan, dan kawasan timur Indonesia.
    - Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan industri, dan kawasan strategis nasional.
    - Penguatan peran DPMPTSP daerah dan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang berbasis data sektoral dan spasial.

4. Transformasi Sektor dan Hilirisasi
    - Dorongan investasi pada sektor hilir berbasis sumber daya alam.
    - Pembangunan ekosistem industri prioritas: baterai, kendaraan listrik, energi hijau, pangan, dan digitalisasi.
    - Peningkatan keterlibatan UMKM dan koperasi dalam rantai pasok investasi.

5. Insentif dan Dukungan Pembiayaan
    - Penyempurnaan skema insentif fiskal dan nonfiskal untuk proyek strategis.

- Pengembangan pembiayaan investasi jangka panjang, termasuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
- Dukungan pembiayaan hijau dan pembiayaan berkelanjutan (*sustainable finance*).

6. Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Investasi
    - Optimalisasi pelaporan LKPM berbasis OSS.
    - Pemanfaatan dashboard monitoring realisasi dan dampak investasi.
    - Penerapan *reward* dan *penalty* bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam mendukung realisasi investasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta untuk Tahun 2027 merupakan tindak lanjut dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2025-2029, yang merupakan penjabaran dari rumusan tujuan, sasaran, strategi, tema pembangunan, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Sejalan dengan visi "Purwakarta Istimewa" dan misi pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029, tujuan pembangunan dirumuskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan yang mencakup beberapa fokus pembangunan, seperti pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan, peningkatan infrastruktur berkelanjutan, peningkatan produktivitas daerah, penguatan daya saing SDM berkelanjutan, penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang lebih spesifik dan terukur dari setiap tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang mencerminkan pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga 5 (lima) tahun ke depan, yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta target tahunan, serta keterkaitan antara isu strategis, tujuan dan sasaran tahun 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan arah pembangunan jangka menengah daerah, maka penyusunan tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 dilakukan secara sistematis melalui penjabaran dan pendekatan *cascading* dari visi misi kepala daerah serta tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025–2029.

Visi Kepala Daerah:

"Purwakarta Istimewa"

Misi Terkait DPMPTSP

Misi 3: Menciptakan iklim investasi dan stabilitas keamanan dan ekonomi yang kondusif, memperluas akses kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berdaya saing.

Tujuan 4: Mewujudkan stabilitas ekonomi dan keamanan serta iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif

Sasaran 9: Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas perekonomian serta daya saing daerah

Strategi 20: Membangun Iklim Investasi yang Kondusif

Arah Kebijakan:

1. Penguatan iklim investasi yang kondusif serta akses pelayanan perizinan yang cepat, mudah diakses dan transfaran
2. Penyediaan peta informasi investasi berdasarkan potensi wilayah dan sektor usaha

Misi 4: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas serta pelayanan publik yang inovatif, efektif, efisien dan berbasis digital.

Tujuan 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, efektif, transparan, akuntabel dan berbasis digital

Sasaran 11: Terwujudnya transformasi tata kelola dan penerapan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga 5 (lima) tahun ke depan. Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati, maka tujuan DPMPTSP Tahun 2025-2029 adalah: "***Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Yang Kondusif, Kompetitif, Inklusif, Dan Berkelanjutan***".

DPMPTSP Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu "Meningkatnya Pertumbuhan Dan Produktivitas Perekonomian Serta Daya Saing Daerah" sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan daerah tersebut serta Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati serta Tujuan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029, maka sasaran yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta pada periode 2025-2029 yaitu:

1) Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Peningkatan Daya Saing Wilayah;
2) Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Serta Pelayanan Penanaman Modal Yang Prima.

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 disamping mempertimbangkan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang dan Forum PerangkatDaerah, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah;
b. Pencapaian Indikator Ekonomi Makro;
c. Perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan;
d. Kebijakan Pusat dan Provinsi dalam penanaman modal;
e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran serta komponen penunjang keberhasilan pembangunan tersebut akan dilaksanakan melalui Program yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dengan mengacu kepada arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RPD Kabupaten Purwakarta dan RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2027, dimana program dan kegiatan Tahun 2027 ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA

Perumusan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, RPJMN 2025-2029, Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029, Renstra DPMPTSP Kab. Purwakarta Tahun 2025-2029 dan Hasil Evaluasi Renja DPMPTSP Tahun 2024. Dengan mengacu hal-hal tersebut di DPMPTSP Kab. Purwakarta telah merumuskan 6 (enam) Program, 14 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan beserta kerangka pendanaan indikatif. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Guna tercapainya target indikator kinerja DPMPTSP, telah dirumuskan kegiatan yang akan menjadi fokus pelaksanaan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2027 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1

Rencana Kerja Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						**13.053.385.723,00**				**17.340.248.200,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.053.385.723,00**				**17.340.248.200,00**
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**13.053.385.723,00**				**17.340.248.200,00**
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**12.638.385.723,00**				**14.580.248.200,00**
		Terlaksananya dukungan manajemen dan pelayanan penunjang urusan pemerintahan secara efektif dan efisien.						***12.508.385.723,00***				***14.260.248.200,00***
			1.Capaian realisasi keuangan Perangkat Daerah	94.65 %		94.45 %	94.55 %	8.793.439.339,00			94.65 %	10.056.174.359,00
			2.Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang berfungsi optimal	75.00 %		72.00 %	73.00 %	8.793.439.339,00			74.00 %	10.056.174.359,00
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.000.000,00				127.083.081,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		-						15.000.000,00				127.083.081,00
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00			1 Dokumen	10.000.000,00
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00			2 Dokumen	30.000.000,00
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00			1 Dokumen	15.000.000,00
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00			1 Dokumen	10.083.081,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00			1 Laporan	22.000.000,00
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00			4 Laporan	40.000.000,00
	2.18.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000,00				30.000.000,00
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	2 Dokumen	30.000.000,00
	2.18.01.2.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00				10.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	1 Dokumen	10.000.000,00
	2.18.01.2.01.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00				10.083.081,00
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	1 Dokumen	10.083.081,00
	2.18.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.000.000,00				22.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	1 Laporan	22.000.000,00
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00				40.000.000,00
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	4 Laporan	40.000.000,00
	2.18.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						0,00				15.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	1 Dokumen	15.000.000,00
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.358.439.339,00				8.560.774.359,00
		-						8.358.439.339,00				8.560.774.359,00
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00			1 Dokumen	10.000.000,00
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00			1 Dokumen	45.000.000,00
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00			1 Laporan	10.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	0,00			3 Laporan	10.000.000,00
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan		47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	8.358.439.339,00			47 Orang/bulan	8.485.774.359,00
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.358.439.339,00				8.485.774.359,00
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan		47 Orang/bulan	48 Orang/bulan	8.358.439.339,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	47 Orang/bulan	8.485.774.359,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									penyeludupan.			
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00				45.000.000,00
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	1 Dokumen	45.000.000,00
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						0,00				10.000.000,00
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	1 Dokumen	10.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									penyeludupan.			
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00				10.000.000,00
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	1 Laporan	10.000.000,00
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						0,00				10.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan		3 Laporan	0 Laporan	0,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	3 Laporan	10.000.000,00
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0,00				50.000.000,00
		-						0,00				50.000.000,00
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00			1 Laporan	30.000.000,00
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00			1 Dokumen	20.000.000,00
	2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00				20.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	1 Dokumen	20.000.000,00
	2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00				30.000.000,00
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	1 Laporan	30.000.000,00
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00				370.400.000,00
		-						0,00				370.400.000,00
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00			4 Dokumen	10.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Kinerja Pegawai									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		1 Paket	2 Paket	0,00			2 Paket	180.000.000,00
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	0,00			30 Orang	180.400.000,00
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00				180.000.000,00
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	2 Paket	180.000.000,00
	2.18.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						0,00				10.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	4 Dokumen	10.000.000,00
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00				180.400.000,00
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		30 Orang	0 Orang	0,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	30 Orang	180.400.000,00
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						135.000.000,00				705.000.000,00
		-						135.000.000,00				705.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	0,00			5 Dokumen	10.000.000,00
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00			1 Dokumen	30.000.000,00
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	0,00			1 Laporan	10.000.000,00
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	50.000.000,00			120 Laporan	170.000.000,00
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	49.561.000,00			2 Paket	250.000.000,00
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00			1 Paket	125.000.000,00
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.017.000,00			1 Paket	60.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.422.000,00			1 Paket	50.000.000,00
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.017.000,00				60.000.000,00
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	10.017.000,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	1 Paket	60.000.000,00
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.422.000,00				50.000.000,00
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.422.000,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	1 Paket	50.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						49.561.000,00				250.000.000,00
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	49.561.000,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 9 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri, dan Perdagangan	2 Paket	250.000.000,00
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00				125.000.000,00
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	1 Paket	125.000.000,00
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00				10.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	0 Dokumen	0,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	5 Dokumen	10.000.000,00
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00				10.000.000,00
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		Laporan	0 Laporan	0,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	1 Laporan	10.000.000,00
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.000.000,00				170.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	60 Laporan	50.000.000,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	120 Laporan	170.000.000,00
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00				30.000.000,00
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	1 Dokumen	30.000.000,00
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						300.000.000,00				450.000.000,00
		-						300.000.000,00				450.000.000,00
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit		4 Unit	8 Unit	100.000.000,00			8 Unit	150.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		30 Unit	30 Unit	200.000.000,00			30 Unit	300.000.000,00
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						100.000.000,00				150.000.000,00
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit		4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	8 Unit	150.000.000,00
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						200.000.000,00				300.000.000,00
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		30 Unit	30 Unit	200.000.000,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	30 Unit	300.000.000,00
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.229.946.384,00				3.477.590.760,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		-						3.229.946.384,00				3.477.590.760,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	608.696.000,00			12 Laporan	806.148.000,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.621.250.384,00			12 Laporan	2.666.192.760,00
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00			12 Laporan	5.250.000,00
	2.18.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00				5.250.000,00
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	12 Laporan	5.250.000,00
	2.18.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						608.696.000,00				806.148.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	608.696.000,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	12 Laporan	806.148.000,00
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.621.250.384,00				2.666.192.760,00
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.621.250.384,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	12 Laporan	2.666.192.760,00
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						600.000.000,00				839.400.000,00
		-						600.000.000,00				839.400.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	300.000.000,00			3 Unit	400.000.000,00
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	30.000.000,00			11 Unit	93.000.000,00
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	20.000.000,00			3 Unit	46.400.000,00
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	20.000.000,00			4 Unit	50.000.000,00
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit		160 Unit	160 Unit	100.000.000,00			160 Unit	150.000.000,00
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	130.000.000,00			1 Unit	100.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.000.000,00				46.400.000,00
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	3 Unit	46.400.000,00
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						30.000.000,00				93.000.000,00
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	30.000.000,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	11 Unit	93.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						20.000.000,00				50.000.000,00
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	4 Unit	50.000.000,00
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00				150.000.000,00
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit		160 Unit	160 Unit	100.000.000,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	160 Unit	150.000.000,00
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						300.000.000,00				400.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	2 Unit	300.000.000,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	3 Unit	400.000.000,00
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						130.000.000,00				100.000.000,00
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	75 Unit	130.000.000,00	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 12 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	1 Unit	100.000.000,00
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**95.000.000,00**				**600.000.000,00**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Terwujudnya iklim investasi yang kondusif, aman, dan menarik bagi investor untuk meningkatkan aliran modal yang diinvestasikan.						***87.500.000,00***				***300.000.000,00***
			1.Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	5.00 %		5.00 %	5.00 %	7.500.000,00			5.00 %	300.000.000,00
			3.Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	10.50 triliun rupiah		8.70 triliun rupiah	9.14 triliun rupiah	7.500.000,00			9.60 triliun rupiah	300.000.000,00
			3.Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar rupiah)	15.00 %		10.05 %	11.00 %	7.500.000,00			11.5 %	300.000.000,00
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						15.000.000,00				300.000.000,00
		-						15.000.000,00				300.000.000,00
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	18 Dokumen		5 Dokumen	6 Dokumen	7.500.000,00			15 Dokumen	300.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00			0 Dokumen	0,00
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						7.500.000,00				0,00
		Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 9 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri, dan Perdagangan	0 Dokumen	0,00
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota						7.500.000,00				300.000.000,00
		Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	18 Dokumen		5 Dokumen	4 Dokumen	7.500.000,00	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di	PP 9 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri, dan Perdagangan	15 Dokumen	300.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									dalam negeri.			
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						80.000.000,00				300.000.000,00
		-						80.000.000,00				300.000.000,00
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	-	15.000.000,00			-	300.000.000,00
			Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	65.000.000,00			-	0,00
	2.18.02.2.02.0006	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						65.000.000,00				0,00
		Tersusunnya Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	65.000.000,00	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 9 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri, dan Perdagangan	-	0,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.18.02.2.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota						15.000.000,00				300.000.000,00
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	15.000.000,00	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 9 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri, dan Perdagangan	-	300.000.000,00
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**20.000.000,00**				**500.000.000,00**
		Terwujudnya peningkatan awareness dan minat investasi melalui kegiatan promosi dan publikasi yang tepat sasaran.						***10.000.000,00***				***500.000.000,00***
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00				500.000.000,00
		-						20.000.000,00				500.000.000,00
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00			2 Dokumen	400.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00			2 Dokumen	100.000.000,00
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00				400.000.000,00
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 9 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri, dan Perdagangan	2 Dokumen	400.000.000,00
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota						10.000.000,00				100.000.000,00
		Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 9 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri, dan Perdagangan	2 Dokumen	100.000.000,00
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**140.000.000,00**				**650.000.000,00**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Terwujudnya layanan penanaman modal yang cepat, transparan, dan profesional demi kemudahan investor dan pelaku usaha.						***125.000.000,00***				***550.000.000,00***
			1.Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan	97.00 %		97.00 %	97.00 %	125.000.000,00			97.00 %	550.000.000,00
			2.Persentase jumlah izin usaha yang diverifikasi	65.00 %		54.00 %	56.00 %	125.000.000,00			58.00 %	550.000.000,00
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						140.000.000,00				650.000.000,00
		-						140.000.000,00				650.000.000,00
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	0,00			12 Dokumen	100.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	75 Pelaku Usaha		40 Pelaku Usaha	75 Pelaku Usaha	15.000.000,00			75 Pelaku Usaha	100.000.000,00
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5100 Pelaku Usaha		4981 Pelaku Usaha	4995 Pelaku Usaha	110.000.000,00			50000 Pelaku Usaha	300.000.000,00
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah						0,00				100.000.000,00
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 9 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri, dan Perdagangan	12 Dokumen	100.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						110.000.000,00				300.000.000,00
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5100 Pelaku Usaha		4981 Pelaku Usaha	4995 Pelaku Usaha	110.000.000,00	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 9 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri, dan Perdagangan	50000 Pelaku Usaha	300.000.000,00
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko						15.000.000,00				100.000.000,00
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	75 Pelaku Usaha		40 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	15.000.000,00	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 9 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri, dan Perdagangan	75 Pelaku Usaha	100.000.000,00
		-						140.000.000,00				650.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	-	15.000.000,00			-	150.000.000,00
	2.18.04.2.01.0009	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						15.000.000,00				150.000.000,00
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	200 Kegiatan Usaha	15.000.000,00	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 9 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri, dan Perdagangan	-	150.000.000,00
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**110.000.000,00**				**660.000.000,00**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Terwujudnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal yang sesuai dengan peraturan dan komitmen investasi.						***110.000.000,00***				***660.000.000,00***
			1.Rasio daya serap tenaga kerja	21.50 %		19.50 %	20.00 %	110.000.000,00			20.50 %	660.000.000,00
			2.Persentase penyelesaian permasalahan investasi yang ditangani	90.00 %		82.00 %	83.00 %	110.000.000,00			84.00 %	660.000.000,00
			3.Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi investasi/penanaman modal	80.00 %		60.00 %	65.00 %	110.000.000,00			70.00 %	660.000.000,00
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						110.000.000,00				660.000.000,00
		-						110.000.000,00				660.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	300 Kegiatan Usaha		100 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	50.000.000,00			220 Kegiatan Usaha	200.000.000,00
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 Pelaku Usaha		120 Pelaku Usaha	275 Pelaku Usaha	40.000.000,00			300 Pelaku Usaha	300.000.000,00
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						40.000.000,00				300.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 Pelaku Usaha		120 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	40.000.000,00	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 9 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri, dan Perdagangan	300 Pelaku Usaha	300.000.000,00
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal						50.000.000,00				200.000.000,00
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	300 Kegiatan Usaha		100 Kegiatan Usaha	35 Kegiatan Usaha	50.000.000,00	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 9 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri, dan Perdagangan	220 Kegiatan Usaha	200.000.000,00
		-						110.000.000,00				660.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	-	20.000.000,00			-	160.000.000,00
	2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya						20.000.000,00				160.000.000,00
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	15 Kegiatan Usaha	20.000.000,00	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 9 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri, dan Perdagangan	-	160.000.000,00
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**50.000.000,00**				**350.000.000,00**
		Terwujudnya pengelolaan data dan sistem informasi investasi yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan dan transparansi.						***50.000.000,00***				***350.000.000,00***

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1.Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	50.000.000,00			100.00 %	350.000.000,00
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00				350.000.000,00
		-						50.000.000,00				350.000.000,00
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00			3 Dokumen	350.000.000,00
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						50.000.000,00				350.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU 2028	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF
									NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 9 : Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri, dan Perdagangan	3 Dokumen	350.000.000,00

BAB V
PENUTUP

Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta disusun sebagai Pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas pada tahun mendatang. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan diantara semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Tim Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2027, secara sinergitas dan terintegrasi.
2. Ketua Tim Perancanaan dan Pelaporan menyusun Evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 yang berdasarkan kepada laporan hasil evaluasi dari seluruh urusan dan sekretariat. Hasil evaluasi, kajian dan analisis Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2027.
3. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2027, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
4. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integritas, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap urusan dan sekretariat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja tahun 2027, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan melakukan koreksi yang

diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada kepala Dinas, melalui ketua Tim Perencanaan dan Pelaporan.

5. Secara proaktif, ketua Tim Perencanaan dan Pelaporan, wajib melakukan monitoring dan mengkaji pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 serta menghimpun dan menganalisis laporan evaluasi Renja setiap 3 (tiga) bulan dan melaporkan hasil evaluasi Renja kepada Kepala Dinas.
6. Pada akhir tahun anggaran 2027, wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2027, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Kepala Dinas melalui Ketua Tim Perencanaan dan Pelaporan serta Sub Bagian Keuangan.
7. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2027 berlaku sejak tanggal 01 Januari 2027 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.

Purwakarta, 28 Juli 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta

Ryan Oktavia, S.T, M.M., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197310171999011001